

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN DESENTRALISASI
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu



Oleh:

ANNISA PRATIWY SUWANDI

2008/05231

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**“PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN
DESENTRALISASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH”
(Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)**

**Annisa Pratiwy Suwandi
05231/2008**

**Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode
Juni 2013 dan telah diperiksa/ disetujui oleh kedua pembimbing**

Padang, Mei 2013

Pembimbing I



**Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M. Si, Ak
NIP : 19580519 199001 1 001**

Pembimbing II



**Fefri Indra Arza SE, M.Sc, Ak
NIP : 19730213 199903 1 003**

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN DESENTRALISASI TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH DAERAH**
(Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang)

Annisa Pratiwy Suwandi

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : annisapratiwysuwandi@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research is to test: 1) Effect of goal clarity of the budgets on local government performance 2) Effect of decentralization on local government performance.

This research is causative study. The population in this study is SKPD on Padang. The selection of the sample with total sampling method. The data used in this study is primary data. Data was collected by distributing questionnaires. The teknik of analysis are using Statistical Package For Social Science (SPSS).

The findings in this study are: 1) the budget goal clarity significant positive effect on the performance of local government significance value $0.001 < 0.05$ and t value $< t_{table}$ is $3,369 > 1.656$ (H_1 be accepted). 2) decentralization significant positive effect on the performance of local government where the significance value $0.003 < 0.05$ and t value $> t_{table}$ is $3,419 > 1.656$ (H_2 be accepted).

In this study suggested: 1) The need for a clear separation of duties of the implementation of the budget to avoid the dual role of each staff, so it can be reduced in the event of fraud task. 2) To further research in order to add other variables such as the quality of financial reporting transparency, public accountability or make variables as moderating variable and intervening variable in future studies.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah. 2) Pengaruh desentralisasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Jenis penelitian ini adalah kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD kota Padang. Pemilihan sampel dengan metode *total sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan *Statistical Package For Social Science* (SPSS).

Hasil penelitian membuktikan bahwa: 1) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah dimana nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $3,369 > 1,656$ (H_1 diterima). 2) Desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah dimana nilai signifikansi $0,003 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,419 > 1,656$ (H_2 diterima).

Dalam penelitian ini disarankan: 1) Perlunya pemisahan tugas yang jelas dari pelaksana anggaran untuk menghindari adanya peran ganda pada masing-masing staf, sehingga dapat berkurangnya peristiwa kecurangan dalam melaksanakan tugas. 2) Untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain seperti kualitas laporan keuangan, transparansi, akuntabilitas publik atau menjadikan variabel tersebut sebagai variabel pemoderasi maupun variabel intervening dalam penelitian yang akan datang.

1. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab yang telah diamandemen dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang melahirkan nuansa baru dalam pemerintahan Indonesia, yaitu pergeseran kewenangan pemerintahan yang sentralistik birokratik ke pemerintahan yang desentralistik partisipatoris. Adanya reformasi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap manajemen keuangan daerah. Perubahan terhadap manajemen keuangan daerah, setidaknya memiliki dua alasan, yaitu: 1) Pelimpahan berbagai wewenang dan urusan kepada daerah akan mengakibatkan manajemen keuangan daerah menjadi semakin kompleks, 2) Tuntutan publik akan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban.

Perubahan aspek reformasi yang paling dominan adalah pada aspek pemerintahan. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah agar senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara Negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan karena masyarakat sering memonitor setiap perencanaan pemerintah dalam satu periode. Selain itu, tuntutan atas perubahan

organisasi publik baik secara individu ataupun anggota kelompok sangat diharapkan, perubahan ini sering ditujukan kepada aparatur pemerintah menyangkut prestasi kerja yang diberikan kepada organisasi.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi (Indra:2006). Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*Strategic Planning*) suatu organisasi. Dengan demikian, kinerja pemerintah dapat dipahami sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi atau tingkat pencapaian hasil dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi tersebut, atau dapat pula disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu tingkatan sejauhmana proses kegiatan organisasi itu memberikan hasil atau mencapai tujuan. Penilaian kinerja dapat diartikan sebagai penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2001). Untuk dapat mengetahui apakah kinerja tersebut efektif/tidak efektif harus dilakukan perbandingan terhadap anggaran. Anggaran merupakan titik awal terbaik dalam menilai kinerja.

Menurut Indra (2006) Pengukuran kinerja sektor publik meliputi aspek-aspek antara lain: kelompok masukan (*input*), kelompok keluaran (*output*), kelompok hasil (*outcome*), kelompok manfaat (*benefit*), kelompok dampak (*impact*).

Salah satu alat yang digunakan manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian jangka pendek dalam organisasi adalah anggaran. Anggaran juga merupakan pernyataan mengenai estimasi

kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran sektor publik harus diinformasikan kepada publik untuk terkait, didistribusikan dan diberi masukan. Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dengan aktifitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat (Mardiasmo,2002)

Anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan anggaran. Menurut Mulyadi (2001) anggaran merupakan rencana yang dinyatakan secara kuantitatif, diukur dalam kesatuan moneter, atau ukuran yang lain dalam jangka waktu satu tahun. Anthony dan Govindarajan (2005) mendefinisikan anggaran sebagai suatu rencana dalam kuantitas yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Kenis (1979) dalam Budi (2011) mengatakan terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Menurut Kenis (1979) dalam Budi (2011), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran juga tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Sehingga dengan

adanya kejelasan sasaran anggaran yang jelas, aparat pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam perealisasiannya, secara langsung ini akan mempengaruhi terhadap kinerja aparat. Salah satu penyebab tidak efektif dan efisiennya anggaran dikarenakan ketidakjelasan sasaran anggaran yang mengakibatkan aparat pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penyusunan target-target anggaran. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada pimpinan, untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Pimpinan akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan SKPD untuk menyusun target anggaran. Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai pemerintah daerah.. Oleh karena itu, kinerja sendiri merupakan hasil akhir (*output*) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Desentralisasi akan menunjukkan tingkat otonomi yang didelegasikan pada SKPD sehingga SKPD mempunyai tanggung jawab yang lebih besar terhadap perencanaan dan pengendalian aktivitas operasi serta membutuhkan informasi yang lebih banyak. Jadi organisasi yang lebih terdesentralisasi seperti pelaksanaan otonomi di Indonesia, maka SKPD mempunyai otonomi yang lebih besar dalam proses pengambilan atau penetapan keputusan. Menurut Wahyudin (2010), desentralisasi adalah seberapa jauh manajer yang lebih tinggi mengizinkan manajer dibawahnya untuk mengambil keputusan secara independen.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?

2. Sejauhmana desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Pengaruh desentralisasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. TELAHAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kinerja

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsum,2006). Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja biasa diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tanpa tujuan atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukur.

Sementara itu kinerja juga dapat diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (AKIP,2000).

Pemerintah daerah merupakan salah satu bagian dari organisasi sektor publik. Menurut Indra (2006) dalam praktiknya definisi organisasi sektor publik di Indonesia adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat, dalam hal ini organisasi pemerintah daerah salah satunya.

Kejelasan sasaran Anggaran

Menurut Dedi (2008), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sector publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resource to unlimited demands*).

Anthony dan Govindarajan (2005), mengemukakan bahwa anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Penyusunan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis.

Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam satu tahunnya disusun secara jelas dan spesifik dan merupakan desain teknis pelaksana, strategi untuk mencapai tujuan daerah. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan umum lebih dari itu anggaran harus memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah. Locke dan Lathan (1984) dalam Samuel (2008) menyatakan bahwa sasaran adalah apa yang hendak dicapai oleh karyawan. Jadi kejelasan sasaran anggaran akan mendorong manajer lebih efektif dan melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas.

Menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang

bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Oleh karena itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab melaksanakannya. Locke (1968) dalam Kenis (1979) menyatakan bahwa penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif. Hal ini akan mendorong karyawan atau staf untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dihendaki sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja.

Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi bingung, tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Kenis (1979) menemukan bahwa pelaksana anggaran memberikan realisasi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran. Kenis juga menyatakan bahwa anggaran tidak hanya sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya dan pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, sisi lain anggaran juga merupakan alat bagi SKPD untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya.

Menurut Steers dan Porter (1976) dalam Samuel (2008) bahwa dalam menentukan sasaran anggaran mempunyai karakteristik utama yaitu:

- a. Sasaran harus spesifik bukannya samar-samar.
- b. Sasaran harus menantang namun dapat dicapai.

Menurut Locke dan Lathan (1984) dalam Samuel (2008), agar pengukuran sasaran efektif ada tujuh indikator yang diperlukan:

- a. Tujuan membuat secara terperinci umum tugas-tugas yang harus dikerjakan.

- b. Kinerja menyatakan kinerja dalam bentuk pernyataan yang dapat diukur
- c. Standar, menetapkan standar/target yang dicapai.
- d. Jangka waktu, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan.
- e. Sasaran prioritas, menetapkan sasaran yang prioritas.
- f. Tingkat kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya.
- g. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi.

Kejelasan sasaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja dapat tercapai. Keterlibatan individu akan memahami sasaran yang akan dicapai oleh anggaran tersebut, serta bagaimana akan mencapainya dengan menggunakan sumber yang ada, selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan yang akan dicapai.

Desentralisasi

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.

1) Prinsip dan Tujuan Desentralisasi

Menurut Hadi (2009) Desentralisasi sebagai salah satu instrument kebijakan Pemerintah yang mempunyai prinsip dan tujuan, antara lain untuk :

- a) Mengurangi kesenjangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antardaerah
- b) Meningkatkan kinerja kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.
- c) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional.
- d) Tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil.
- e) Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Desentralisasi merupakan praktik pendelegasian wewenang atau otoritas pengambilan keputusan dari jenjang manajer yang lebih atas kepada jenjang manajer yang lebih rendah (Krismiaji,2009). Organisasi yang terdesentralisasi adalah sebuah organisasi yang memiliki kebijakan bahwa pembuatan keputusan tidak dipusatkan di manajemen pusat, namun pembuatan keputusan disebar atau dilakukan oleh seluruh manajer pada berbagai jenjang sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditentukan sebelumnya (Krismiaji,2009).

Menurut Krismiaji (2009) keuntungan dan kerugian desentralisasi:

- a. Desentralisasi atau pendelegasian kewenangan kepada manajer yang lebih rendah memiliki keuntungan sebagai berikut:

- 1) Akses ke informasi lokal.

Manajer divisi memiliki akses divisi lokal atau informasi tentang divisi yang bersangkutan secara lebih baik dibanding manajemen pusat.

- 2) Keterbatasan kognitif

Meskipun manajemen pusat dapat memperoleh informasi lokal, namun manajemen pusat tetap saja menghadapi persoalan. Dalam sebuah organisasi yang lebih besar dan kompleks, serta menghasilkan

banyak produk, tidak ada seorangpun yang mampu menguasai seluruh persoalan yang terjadi.

- 3) Respon lebih tepat waktu

Dengan menyerahkan wewenang untuk membuat keputusan kepada manajer divisi, maka respon terhadap persoalan yang muncul lebih tepat waktu.

- 4) Fokus manajemen pusat

Manajemen pusat dapat lebih memfokuskan dan berkonsentrasi pada persoalan-persoalan dan pembuatan keputusan strategik, yaitu persoalan dan keputusan jangka panjang yang menyangkut perusahaan secara keseluruhan.

- 5) Pelatihan dan penilaian

Desentralisasi juga mampu untuk menilai kinerja para manajer divisi dan memiliki kemampuan membuat keputusan yang baik dan tepat, dapat terpilih untuk dipromosikan.

- 6) Motivasi

Dengan motivasi yang lebih tinggi, para manajer akan lebih proaktif mengambil inisiatif dan lebih kreatif.

- 7) Meningkatnya kompetensi

Cara terbaik untuk memperbaiki kinerja divisi adalah melakukan pengukuran kinerja, dan pengukuran kinerja ini hanya dapat dilakukan jika masing-masing divisi diberi kewenangan untuk membuat keputusan sendiri dan menerapkan keputusan tersebut.

- b. Desentralisasi juga mengalami kelemahan sebagai berikut:

- 1) Keputusan parsial

Para manajer divisi membuat keputusan tanpa memahami kepentingan perusahaan secara keseluruhan.

2) Koordinasi lemah

Dalam sistem desentralisasi murni, umumnya tidak ada koordinasi antar manajer divisi. Para manajer divisi membuat keputusan sendiri antara individu dengan hanya mengacu pada kepentingan divisi masing-masing.

3) Perbedaan tujuan

Para manajer divisi kadang-kadang memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan.

4) Sulit mengkomunikasikan ide

Dalam perusahaan yang terdesentralisasi secara penuh, para manajer seringkali kesulitan untuk menyebarkan ide inovatif.

Menurut Andarias Bangun (2009), agar pengukuran desentralisasi semakin baik ada indikator dalam desentralisasi yang mengacu ke Permendagri 13 Tahun 2006 terdiri dari:

- a. Pemberian kewenangan dalam menentukan jumlah anggaran
- b. Pemberian kewenangan dalam menentukan program dan kegiatan
- c. Penunjukan kewenangan dalam menentukan keterlibatan pegawai
- d. Peningkatan kewenangan dalam menentukan skala prioritas
- e. Pemberian kewenangan dalam menentukan penambahan dan mutasi pegawai.

Penelitian Relevan

Penelitian Indraswari (2010) Menguji Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala subbagian/kepala subseksi pada lembaga teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 108 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian menurut Syafril (2009), meneliti ketepatan skedul penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan terhadap kinerja manajerial SKPD pada pemerintah kabupaten sorolangun. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan ketepatan skedul penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD. Secara parsial ketepatan skedul penyusunan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD.

Penelitian menurut Dido Peto Sifarif (2011), meneliti karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah kota Padang pada SKPD Kota Padang. Responden dalam penelitian ini adalah: eselon I, eselon II, eselon IV di kota padang. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan, bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah kota padang dan umpan balik, evaluasi anggaran, dan kesulitan anggaran juga demikian

Penelitian Rafika Anggraeini (2009) meneliti Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja SKPD Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. Hasil analisis secara parsial, menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Labuhan batu. Penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi anggaran dan komitmen organisasi secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Pelabuhan Batu.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Darma (2004) adanya hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja dalam konteks pemerintah daerah menunjukkan hasil yang signifikan. Sebaliknya, penelitian

Adoe (2002) menunjukkan kejelasan anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial.

Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Kenis (1979) dalam Budi (2006) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran itu dipahami oleh orang yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut. Oleh karena sasaran anggaran pemerintah daerah dinyatakan secara jelas, spesifik dan mudah dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab yang melaksanakannya.

Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, aparat pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam perealisasiannya, secara tidak langsung ini akan mempengaruhi terhadap kinerja aparat. Salah satu penyebab tidak efektif dan efisiennya anggaran dikarenakan ketidakjelasan sasaran anggaran yang mengakibatkan aparat pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penyusunan target-target anggaran.

Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat, untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan dengan tepat. Selanjutnya, hal ini akan menurunkan perbedaan antara anggaran yang disusun dengan estimasi terbaik bagi organisasi.

Penelitian menurut Syafril (2009), meneliti ketepatan skedul penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan terhadap kinerja

manajerial SKPD pada pemerintah kabupaten sorolangun. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan ketepatan skedul penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD.

H1 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Hubungan Desentralisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Desentralisasi adalah proses penentuan kegiatan, penentuan nilai, penentuan orang yang bertanggung jawab atas program dan kegiatan, menentukan prioritas program dan kegiatan. organisasi desentralisasi secara umum ditujukan dengan pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi. Dalam sentralisasi yang baik, sebagian keputusan diambil pada tingkat hirarki organisasi yang tertinggi, dan apabila sebagian otorisasi didelegasikan pada level yang rendah dalam organisasi, maka organisasi tersebut lebih desentralisasi.

Desentralisasi akan menunjukkan tingkat otonomi yang didelegasikan pada SKPD sehingga SKPD mempunyai tanggung jawab yang lebih besar terhadap perencanaan dan pengendalian aktivitas operasi serta membutuhkan informasi yang lebih banyak. Jadi organisasi yang strukturnya lebih terdesentralisasi seperti pelaksanaan otonomi di Indonesia, SKPD mempunyai otonomi yang lebih besar dalam proses pengambilan atau penetapan keputusan.

Penelitian dari Andarias Bangun (2009) tentang Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai variabel pemoderasi (Studi Pada Pada Pemerintah Deli Serdang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi

berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD.

H2 : Desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan pada judul penelitian dan permasalahan, maka jenis penelitian ini ialah penelitian kausatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain (Sugiyono : 2004)

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Padang. Penentuan sampel ditetapkan dengan teknik *total sampling*. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian/Seksi/Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Bagian/Seksi/Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada 45 SKPD di Pemerintah Daerah Kota Padang yang dianggap mampu untuk menggambarkan kinerja pemerintah daerah dari tiap instansi secara keseluruhan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini ialah data subjek. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebar kuesioner. Kuesioner diberikan langsung kepada responden dan untuk pengembaliannya akan dijemput sendiri oleh peneliti pada waktu yang telah ditentukan.

Variabel dan Pengukuran Variabel Variabel terikat (dependent variable)

Variabel terikat dalam penelitian ini ialah Kinerja pemerintah daerah (Y).

Variabel bebas (independent variable)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas ialah kejelasan sasaran anggaran (X_1) dan desentralisasi (X_2).

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan kuesioner. Kinerja dapat dilihat dari :

1. Masukan/input
2. Keluaran/output
3. Hasil/outcome
4. Manfaat/benefit
5. Dampak/impact

Untuk kejelasan sasaran anggaran dapat dilihat dari :

1. Tujuan
2. Kinerja
3. Standar
4. Jangka waktu
5. Sasaran prioritas
6. Tingkat kesulitan
7. koordinasi

Desentralisasi di dapat dilihat dari :

1. Pemberian kewenangan untuk jumlah anggaran.
2. Pemberian kewenangan untuk menentukan program dan kegiatan
3. Penunjukkan kewenangan dalam menentukan keterlibatan pegawai
4. Pemberian kewenangan untuk menentukan penambahan dan mutasi pegawai.

Uji validitas dan Reliabilitas

Sebelum dibagikan kuesioner kepada responden, peneliti terlebih dahulu melakukan uji pendahuluan (*pilot test*), yang dilakukan pada 30 orang mahasiswa di fakultas ekonomi akuntansi.

Hasil Uji Coba Instrumen

Hasil pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kuat butir-butir variabel yang ada pada penelitian ini. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan *corrected item-total correlation*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $n=30$ adalah 0.3061.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan metode *kolmogorov smirnov*, dengan melihat nilai signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal, jika nilai signifikan yang dihasilkan > 0,05 maka data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai *variance inflation factor (VIF)* dan toleransi. Jika $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,1$ maka tidak terjadi multikolinieritas tapi jika $VIF > 10$ dan $tolerance > 0,1$ berarti terjadi multikolinieritas.

Uji heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji *glejser*. Dalam uji ini, apabila hasilnya $sig > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, model yang baik ialah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Teknik Analisis Data

Koefisien Determinasi yang disesuaikan

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtut (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2005).

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen digunakan model regresi berganda dikarenakan lebih dari satu variabel bebas dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan :

Y: Kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang

a : Konstanta

$b_{1,2,3}$:Koefisien regresi dari variabel independen

x_1 : Kejelasan Sasaran Anggaran

x_2 : Desentralisasi

e : Error

Uji F (F-test)

Uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika $p \text{ value} < () = 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$, berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis dengan tingkat kepercayaan () untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau () = 0,05

Uji Hipotesis

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan kecil dari $\alpha = 5\%$ berarti variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis ialah 95% atau () = 0,005 (5%).

Defenisi Operasional

a. Kinerja

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

b. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut.

c. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan praktik pendelegasian wewenang atau otoritas pengambilan keputusan dari jenjang manajer yang lebih atas kepada jenjang manajer yang lebih rendah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian

Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *corrected item-total colleration*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 105$ adalah 0,194.

Untuk instrumen kinerja pemerintah daerah diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,364. Instrumen kejelasan sasaran anggaran nilai terkecil 0,536, dan untuk instrumen desentralisasi dengan nilai terkecil sebesar 0,875

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar dan bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan menghasilkan hasil yang konstan. Nilai reliabilitas dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing instrumen pertanyaan lebih besar dari 0,6 (Ghozali :2007).

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada tabel di atas yaitu untuk instrumen variabel kinerja 0,364. Untuk variabel kejelasan sasaran

anggaran 0,536 dan untuk variabel desentralisasi 0,875.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal.

Dari Tabel hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,940 dengan signifikan 0,340. Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian dinyatakan berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut

2. Uji Multikolinearitas

Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value* untuk masing-masing variabel independen. Apabila *tolerance value* di atas 0,10 dan VIF kurang dari 10 maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Hasil nilai VIF yang diperoleh dalam tabel di atas menunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada di atas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

3. Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ atau 5%. Jika

signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Berdasarkan tabel, dapat dilihat tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel AbsUt. Tingkat signifikansi $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Data

1. Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel, besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,268. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi adalah sebesar 26,8% sedangkan 73,2% ditentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini

Persamaan Regresi

Berdasarkan Tabel di atas dapat menghasilkan model analisis sebagai berikut:

$$Y = 25,615 + 0,340 (X_1) + 0,139 (X_2)$$

Keterangan :

- Y = Kinerja Pemerintah Daerah
 X_1 = Kejelasan Sasaran Anggaran
 X_2 = Desentralisasi

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

a. Nilai konstanta

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 25,615 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi adalah nol maka nilai kinerja pemerintah daerah adalah sebesar konstanta 25,615.

b. Koefisien regresi (b) X_1

Nilai koefisien variabel X_1 yaitu kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,340 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pengaruh kejelasan sasaran anggaran satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kinerja di pemerintah daerah sebesar 0,340 satuan. Nilai koefisien dari variabel X_1 bernilai positif 0,340.

c. Koefisien regresi (b) X_2

Nilai koefisien variabel X_2 yaitu desentralisasi sebesar 0,139 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan adanya desentralisasi di pemerintah satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kinerja pemerintah daerah sebesar 0,139 satuan. Nilai koefisien dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,139.

2. Uji F (F-test)

Untuk menguji hipotesis ini, maka dilakukan uji F dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Nilai F_{tabel} pada level signifikansi 0,05 adalah 2,40 Hasil pengolahan statistik analisis regresi menunjukkan nilai $F = 20,00$ yang signifikan pada level 0,000. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $20,00 > 2,40$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi yang digunakan sudah *fix*, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi variabel-variabel penelitian. Dari hasil pengujian juga dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi secara bersama-sama atau secara silmutan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

3. Uji Hipotesis (t-test)

Uji hipotesis dapat dilakukan sebagai berikut:

a) Hipotesis 1

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,001 $< 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 3,369 > t_{tabel} 1,659$. Nilai koefisien dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,340. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_1 dapat diterima. Dimana semakin baik penerapan kejelasan sasaran anggaran maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat

membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja di pemerintah daerah

b) Hipotesis 2

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,003 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 3,019 > t_{tabel} 1,65993$. Nilai koefisien dari variabel X_2 bernilai positif yaitu $0,139$. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_2 dapat diterima. Dimana semakin baik penerapan desentralisasi maka semakin baik pula kinerja di pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan penerapan desentralisasi (X_2) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja di pemerintah daerah.

Pembahasan

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka kinerja pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah juga akan semakin meningkat.

Hal ini konsisten dengan teori yang dinyatakan oleh Menurut Kenis (1979) dalam Budi (2011), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Oleh karena itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab melaksanakannya. Kenis (1979) dalam Budi (2011), juga menyatakan bahwa anggaran tidak hanya sebagai alat

perencanaan dan pengendalian biaya dan pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, sisi lain anggaran juga merupakan alat bagi SKPD untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya.

Dilihat dari data distribusi frekuensi untuk variabel kejelasan sasaran anggaran di mana tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel tersebut berada pada kategori baik sehingga kejelasan sasaran dengan semakin baik, maka akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang semakin meningkat. Dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja yang semakin baik, keterlibatan individu dalam penyusunan anggaran akan memahami sasaran yang akan dicapai oleh anggaran tersebut, serta bagaimana akan mencapainya dengan menggunakan sumber yang ada, selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai.

Jika dilihat dari tabel distribusi frekuensi, nilai TCR terendah yaitu $84,38\%$ yang berarti pengaruh sasaran dalam pekerjaan yang cukup menantang, tetapi layak dan cara memahami bagaimana kinerja dapat diukur masih dikategorikan baik. Nilai rerata kejelasan sasaran anggaran dikategorikan baik dengan nilai TCR $85,87\%$. Dapat dikatakan bahwa Kejelasan sasaran anggaran SKPD pemerintah di Kota Padang dikategorikan baik dan berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dalam organisasi sektor publik (SKPD) akan meningkatkan adanya kinerja yang baik, hal ini sesuai dengan penelitian dari Andarias Bangun (2009) tentang Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Desentralisasi Terhadap Kinerja SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai variabel pemoderasi (Studi Pada Pada

Pemerintah Deli Serdang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD.

2. Pengaruh Desentralisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah. Pengaruh antara penerapan desentralisasi dengan kinerja pemerintah adalah bahwa semakin baik penerapan desentralisasi maka kinerja pemerintah juga akan tercapai. Pernyataan ini juga sejalan dengan alasan suatu organisasi membentuk struktur desentralisasi yaitu (1) akan memberikan Top manajemen waktu yang lebih banyak pada keputusan strategik jangka panjang dari keputusan operasi, (2) dapat membuat organisasi memberikan respon yang lebih cepat dan efektif pada suatu masalah, (3) sistem ini tidak memungkinkan untuk mendapatkan seluruh kebutuhan yang optimal, (4) akan menghasilkan hasil *training* yang baik untuk calon Top manajemen dimasa yang akan datang, (5) memenuhi kebutuhan ekonomi dan kemudian menjadi alat motivasi yang kuat bagi SKPD.

Desentralisasi akan menunjukkan tingkat otonomi yang didelegasikan pada SKPD yang mempunyai tanggung jawab yang lebih besar terhadap perencanaan dan pengendalian aktivitas operasi serta membutuhkan informasi yang lebih banyak. Jadi organisasi yang lebih terdesentralisasi seperti pelaksanaan otonomi di Indonesia, para manajerial SKPD mempunyai otonomi yang lebih besar dalam proses pengambilan atau penetapan keputusan. Dengan kata lain, semakin baik tingkat terdesentralisasi organisasi di pemerintahan daerah maka semakin baik pula tingkat kinerja SKPD dalam menjalankan tugas negara.

Jika dilihat dari tabel distribusi frekuensi, nilai TCR terendah yaitu

73,14% yang berarti pengaruh wewenang untuk menentukan penambahan pegawai disatuan kerja masih dikategorikan baik. Nilai rerata desentralisasi dikategorikan baik dengan nilai TCR 76,67%. Dapat dikatakan desentralisasi dikategorikan baik dan berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa desentralisasi dalam organisasi sektor publik (SKPD) akan meningkatkan adanya kinerja yang baik, hal ini sesuai dengan penelitian menurut Simon (1989) dalam Andarias Bangun (2009) yaitu suatu organisasi administratif adalah sentralisasi yang luas apabila keputusan yang dibuat pada level organisasi yang tinggi, desentralisasi yang luas apabila keputusan didelegasikan dari top manajemen ke level manajemen yang rendah dari wewenang eksekutif. Dengan demikian desentralisasi akan membuat tanggung jawab yang lebih besar kepada SKPD dalam melaksanakan tugasnya serta memberikan kebebasan dalam bertindak. Dengan desentralisasi akan meningkatkan independensi SKPD dalam bertindak dan berfikir dalam suatu tim tanpa mengorbankan keputusan dalam suatu organisasi.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah Kota Padang. Di mana semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka semakin baik pula kualitas kinerja.
2. Penerapan desentralisasi pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pada pemerintah Kota Padang. Di mana semakin baik penerapan desentralisasi pemerintah maka semakin baik pula kualitas kinerja.

Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 26,8%. Sedangkan 73,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah di kota Padang.
2. Waktu penelitian yang dilakukan pada akhir tahun mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian, karena pada akhir periode akuntansi kesibukan responden dalam menyiapkan laporan keuangan tahunan akan mempengaruhi kondisi pegawai dalam menjawab kuesioner yang diberikan. Tetapi hasil akan berbeda apabila dilakukan pada saat responden tidak terlalu sibuk.

Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Perlunya pemisahan tugas yang jelas dari pelaksana anggaran untuk menghindari adanya peran ganda pada masing-masing staf., sehingga dapat berkurangnya peristiwa kecurangan dalam melaksanakan tugas.
2. Bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain seperti kualitas laporan keuangan, transparansi, akuntabilitas publik atau menjadikan variabel tersebut sebagai variabel pemoderasi

maupun variabel intervening dalam penelitian yang akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani. 2009. *Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 2000. *Kinerja Pegawai*. Jakarta.

Andarias Bangun. 2009. "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal Sebagai Pemoderasi". *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.

Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen* buku dua. Terjemahan Kurniawan Tjakrawala. Jakarta: Salemba Empat.

Budi Astuti. 2011. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Pimpinan Dalam Pelaksanaan Program di SKPD dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi". *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.

Deddi Noerdiawan. 2008. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Dua*. Jakarta: Salemba Empat.

Dwiyanto, Agus. 1999. *Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Makalah Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik Kebijakan dan Persiapannya*. Yogyakarta : Fispol UGM.

Ekawati Nurhandayani. 2008. "Pengaruh Komitmen Organisasi dan

- Perlimpahan Wewenang Terhadap Hubungan Penganggaran Partisipatif dengan Kinerja Manajerial”.*Skripsi*. Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Ekspos News. 2011. DPRD Menduga 4 SKPD di Padang Mengalami Kebocoran.
<<http://www.google.co.id>>.
Diakses tanggal (18/12/2012)
- Gaspersz, Vincent. 2008. “Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi Balanced Scorecard dengan Six Sigma untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintah”. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan Adisaputro, dkk. 1994. *Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta: BPFEE.
- Hadi. 2009. *Pengaruh desentralisasi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*. Skripsi Bandung.
- Imam Ghozali . 2007. *Aplikasi Analisis Multilavare dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Jakarta: Earlangga.
- Kenis. 1979. *Effects on Budgetary Goal 5Characteristic on Managerial Attitude and Performance, The Accounting Review*.
- Krismiaji. 2009. *Dasar-Dasar Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta. UPP-AMP YKPN.
- Mahsun, Sulistiyowati, dan Andre. 2006. *Akuntansi sektor Publik*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Dua. Yogyakarta: Penerbit Andi . 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi.
- Mulyadi dan Setyawan. 2001. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta : Salemba Empat.
- Padang Ekspres. 2011. Pemasukan Hilang Rp5,1 M, Akibat Pengelolaan Pasar yang tidak maksimal
<<http://www.google.co.id>>.
Diakses tanggal (15/12/2012)
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pemerintah.
- Sadjiarto, Arja. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah. *Jurnal Akuntansi & keuangan*.
- Samuel Abel T.S. 2008. “Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening pada Kawasan Industri Medan”. *Tesis*. Medan.
- Siegel, G dan H. R. Marconi Boulian. 1989. “*Behavioral Accounting*”. Cincinnati. Ohio. Sounth-Western Publishing Co. Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi (Ed). 1989. *Metode Penelitian Survei*. Edisi Revisi. Jakarta: LP3ESL.

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: PT. Alfabeta.

Pemerintah Kota Padang”. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.

Wahyudin. 2010.” Pengaruh Kejelasan anggaran dan Sistem Pengukuran kinerja Terhadap Kinerja Sektor Publik (*Studi Empiris di Politeknik Negeri Semarang*)”. *Tesis*. Program S-2 Universitas Diponegoro Semarang.

Wilfah Busri. 2006. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembagian Tugas Terhadap Kinerja

LAMPIRAN

1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	105	30.00	45.00	39.0190	3.04764
X1	105	15.00	35.00	30.0571	2.90831
X2	105	7.00	30.00	23.0000	6.37754
Valid N (listwise)	105				

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.58296644
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.092
	Negative	-.067
Kolmogorov-Smirnov Z		.940
Asymp. Sig. (2-tailed)		.340

a. Test distribution is Normal.

b. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1(Constant)		
X1	.761	1.315
X2	.761	1.315

a. Dependent Variable: Y

c. Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.370	1.599		-.231	.818
X1	.090	.060	.168	1.495	.138
X2	-.012	.027	-.049	-.432	.667

a. Dependent Variable: AbsUt

3. Hasil Analisis Data

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.531 ^a	.282	.268	2.60817

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

b. Persamaan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	25.615	2.689		9.525	.000
X1	.340	.101	.324	3.369	.001
X2	.139	.046	.291	3.019	.003

a. Dependent Variable: Y

c. Uji F

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	272.103	2	136.052	20.000	.000 ^a
Residual	693.858	102	6.803		
Total	965.962	104			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y